Pengaruh Oligarki
Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Media, dan Partai Politik di Indonesia

Oleh: Yappi Manafe
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

Pengantar

Oligark[@)] adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi sumber daya material dalam jumlah sangat besar yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusif mereka. Sumber daya tersebut harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, meskipun sumber daya itu tidak secara pribadi dimiliki. Jika kekayaan pribadi yang ekstrem tidak mungkin ada atau tidak terdapat, maka oligark juga tidak ada. Tiga hal yang sangat relevan dengan oligarki sbb: *Pertama,* kekayaan merupakan suatu bentuk kekuasaan material yang berbeda dari seluruh sumber daya kekuasaan lainnya yang dapat terkonsentrasi di tangan kelompok minoritas. *Kedua,* penting bahwa penguasaan dan pengendalian atas sumber daya tersebut ditujukan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi, bukan untuk keuntungan atau operasi institusional. Oligark selalu merupakan individu, bukan korporasi atau bentuk kolektivitas lainnya. *Ketiga,* definisi oligarki tetap konstan sepanjang waktu dan di berbagai kasus. Faktor-faktor inilah yang secara konsisten mendefinisikan oligark, membedakan mereka dari elite, dan membedakan oligarki dari bentuk-bentuk dominasi minoritas lainnya. Oligark dan oligarki muncul karena sebagian aktor berhasil menimbun sumber daya kekuasaan material dalam jumlah sangat besar dan kemudian menggunakan sebagian dari sumber daya tersebut untuk mempertahankan kekayaan, dengan implikasi penting bagi keseluruhan struktur sosial. Dengan demikian, oligark dan oligarki tidak akan berhenti eksis melalui prosedur demokratis, melainkan ketika distribusi sumber daya material yang sangat tidak setara berhasil dihapuskan, sehingga tidak lagi memberikan kekuasaan politik yang berlebihan kepada aktor minoritas. Oligarki adalah suatu sistem di mana kekuasaan berada di tangan sekelompok kecil elite yang mengendalikan otoritas politik dan ekonomi, dan media, membatasi partisipasi masyarakat, serta mendorong terjadinya ketimpangan. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil orang. Kata "oligarki" berasal dari kata Yunani oligos (sedikit) dan arkhein (memerintah), yang berarti "pemerintahan oleh segelintir orang." Dalam sistem oligarkis, otoritas politik, kekuasaan ekonomi, atau keduanya dikendalikan oleh sejumlah terbatas individu, keluarga, korporasi, pemimpin militer, atau kelompok elite. Sistem ini membuat rakyat biasa memiliki kekuasaan yang sangat kecil untuk menentukan masa depan negaranya.

Kesenjangan yang menghadirkan konflik sosial: Ketimpangan material yang signifikan dalam masyarakat dapat menghasilkan gesekan dan konflik. Ada banyak cara ketimpangan tersebut dapat diwujudkan, misalnya: Satu kelompok etnis atau agama mungkin jauh lebih kaya dibandingkan kelompok lainnya, atau kesenjangan tersebut dapat bersifat regional. Kita memasuki ranah oligark dan oligarki ketika ketimpangan yang dimaksud menempatkan sejumlah kecil aktor kaya berhadapan dengan massa yang jauh lebih miskin—dan, dalam kondisi tertentu, menempatkan oligark berhadapan satu sama lain. Gesekan dan konflik yang muncul menghasilkan tantangan politik yang signifikan bagi kelompok kaya. Kesenjangan material yang mendalam menciptakan suatu minoritas aktor yang terbatas (oligark); kesenjangan tersebut menghasilkan konflik sosial dan politik yang dapat diidentifikasi yang menghadirkan tantangan-tantangan khusus yang harus dihadapi oleh para aktor tersebut (pertahankan kekayaan); dan pada saat yang sama menyediakan timbunan sumber daya kekuasaan material yang unik, yang kemudian digunakan secara politik untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut (oligarki).

Karakteristik Oligarki

Oligarki memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk pemerintahan lain seperti demokrasi, monarki, atau kediktatoran. Berikut adalah karakteristik utamanya:

Kekuasaan oleh Kelompok Kecil: Kekuasaan politik dipegang oleh sejumlah terbatas individu, bukan oleh masyarakat umum;

Konsentrasi Kekayaan dan Kekuasaan: Otoritas ekonomi dan politik biasanya dikendalikan oleh elite kaya, keluarga berpengaruh, atau kelompok yang kuat;

Partisipasi Publik yang Terbatas: Warga negara biasa hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan;

Penguasaan atas Lembaga-Lembaga Utama: Kelompok yang berkuasa sering kali mengendalikan lembaga-lembaga utama seperti militer, lembaga peradilan, media, dan industri-industri besar;

Kurangnya Transparansi: Keputusan-keputusan biasanya dibuat secara tertutup, dengan pertanggungjawaban kepada publik yang sangat terbatas;
Persaingan Politik yang Dibatasi: Pemilihan umum, apabila diselenggarakan, sering kali dimanipulasi atau dibatasi untuk menjamin dominasi kelompok elite tetap berlanjut;

Pewarisan atau Seleksi Elite; Kekuasaan dapat diwariskan melalui garis keluarga (aristokrasi) atau dipilih dari dalam lingkungan elite;

Kebijakan yang Menguntungkan Elite: Undang-undang dan kebijakan pada umumnya dirancang untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas yang berkuasa;

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Biasanya terdapat kesenjangan yang besar antara elite penguasa dan masyarakat umum.

Jenis-Jenis Oligarki

Oligarki dapat berwujud dalam berbagai bentuk, tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan dalam kelompok kecil yang berkuasa. Berikut adalah jenis-jenis utama oligarki:

Plutokrasi: Suatu bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh individu-individu kaya dan memiliki kekayaan besar. Kekuasaan dapat dijalankan secara langsung (orang-orang kaya menduduki jabatan resmi) atau secara tidak langsung (memengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan). Keputusan-keputusan politik terutama melayani kepentingan ekonomi dan keuangan.

Aristokrasi: Pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok elite atau kelas bangsawan, yang sering kali mencakup keluarga kerajaan. Kekuasaan biasanya bersifat turun-temurun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kelas penguasa menikmati prestise sosial, hak-hak istimewa ekonomi, dan kewenangan politik.

Teokrasi: Suatu sistem di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan otoritas keagamaan. Pemerintahan dijalankan oleh anggota lembaga-lembaga keagamaan. Contoh: kekuasaan Paus di Kota Vatikan atau Pemimpin Tertinggi *("Supreme Leader") di Iran.*

Stratokrasi: Suatu pemerintahan di mana militer secara resmi menjalankan kekuasaan pemerintahan. Berbeda dengan kediktatoran militer, dalam stratokrasi para pejabat militer secara formal dan legal diberikan kewenangan untuk memerintah. Angkatan bersenjata memainkan peran administratif yang sentral.

Kraterokrasi (Kratokrasi): Suatu sistem di mana mereka yang memiliki kekuatan fisik atau kekuatan yang lebih unggul memerintah orang lain. Kekuasaan politik diperoleh atau dipertahankan melalui kekuatan atau ancaman.
Sistem ini mengikuti prinsip *"might makes right",* yaitu *"yang kuatlah yang benar" atau "kekuatan menentukan kebenaran."*

Timokrasi: Suatu sistem di mana kekuasaan politik didasarkan pada kehormatan, kepemilikan properti, atau prestasi militer.

Hanya individu yang memenuhi kualifikasi tertentu dalam hal kepemilikan kekayaan atau status yang dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Kepemimpinan sering kali dikaitkan dengan reputasi dan kedudukan sosial.

Munculnya Oligark di Indonesia

Genggaman demokrasi Indonesia oleh oligarki dimulai dengan sekelompok oligark yang memainkan peran di belakang layar dalam keruntuhan Suharto dan secara praktis tidak mengalami gangguan apa pun dalam jajaran mereka selama bertahun-tahun transformasi politik. Namun, yang menyertai transisi dari kediktatoran menuju demokrasi adalah transisi yang sama pentingnya: dari oligarki sultanistik, di mana orang-orang yang sangat kaya dikendalikan secara pribadi oleh Suharto, menuju oligarki penguasa elektoral yang lebih kacau, di mana terdapat jauh lebih sedikit pembatas efektif terhadap kekuasaan oligarkis.

Kemampuan untuk menggunakan kekayaan secara strategis telah muncul sebagai salah satu sumber daya kekuasaan yang paling penting dalam politik elektoral Indonesia. Berbeda dengan Filipina, di mana oligark-oligark pemilik tanah berakar pada abad kesembilan belas di bawah pemerintahan Spanyol, Hindia Belanda selama periode kolonial hanya memiliki elite dan tidak memiliki oligark. Meskipun terdapat program-program pemerintah yang dirancang untuk mendorong para pengusaha, tahun-tahun Sukarno sejak Perang Dunia II hingga akhir 1960-an sangat kacau secara ekonomi dan politik untuk memungkinkan munculnya kelompok orang Indonesia yang diberdayakan oleh kekayaan yang terkonsentrasi.

Pada masa pemerintahan sultanistik Suharto, oligark modern Indonesia pertama kali muncul. Suharto tidak hanya menciptakan oligark-oligark, tetapi juga mengendalikan mereka seperti seorang Godfather mafia. Tidak peduli seberapa besar atau kayanya seseorang, Suharto dapat menghancurkannya. Semua persoalan mengenai pertahanan kekayaan, klaim kepemilikan, dan kontrak berpusat pada Suharto. Hal ini memberikan nilai yang sangat tinggi pada politik kedekatan—kedekatan dengan Suharto lebih penting daripada apa pun. Semakin besar kepentingan finansial yang dipertaruhkan, semakin penting pula akses kepada lingkaran dalam di sekitar Suharto, jika bukan langsung kepada dirinya. Suharto memulai kariernya sebagai anggota elite Indonesia yang memegang jabatan formal sebagai jenderal dalam angkatan bersenjata. Namun, ia dengan cepat menjadi sangat kaya dan dengan demikian menjadi seorang oligark sendiri—memerintah oligarki sultanistik sebagai yang pertama di antara orang-orang yang sederajat (“*first among equals*”). Unsur penting dalam menjalankan oligarki sultanistik semacam itu adalah bahwa semua basis kekuasaan independen yang bersaing harus ditundukkan. Suharto dan kroni-kroninya memastikan hal ini terjadi di seluruh perekonomian dan birokrasi. Ahli Politik AS, Daniel S. Lev menulis tentang sistem hukum dan politik di Indonesia menyatakan bahwa Suharto yang menyelesaikan pekerjaan (sistem hukum Indonesia) dan memastikan bahwa satu-satunya jalan yang dimiliki oligark untuk mencari perlindungan, dan

satu-satunya hal yang dapat secara andal menjinakkan mereka, adalah Suharto sendiri. Kontribusi Suharto yang paling signifikan terhadap sistem hukum Indonesia yang telah dilumpuhkan setelah 1965 adalah memastikan bahwa sistem tersebut tidak dapat pulih dari pukulan dahsyat yang dialaminya selama periode Demokrasi Terpimpin Sukarno. Lapisan baru oligark Indonesia dibangun secara bertahap dan pada awalnya didorong oleh upaya Jenderal Suharto untuk mengonsolidasikan rezimnya setelah Sukarno disingkirkan. Suharto pertama-tama berfokus pada ekstraksi kekayaan nasional yang dapat disalurkan untuk membeli loyalitas para pesaing potensial di dalam angkatan bersenjata. Ia mendorong kemitraan bisnis awal antara orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa dan para jenderal.

Pada pertengahan 1970-an, para pedagang Tionghoa yang sebelumnya hanya merupakan pelaku perdagangan mulai muncul sebagai oligark dalam hak mereka sendiri. Pada awal 1980-an, Suharto mulai memberikan perhatian lebih besar kepada orang-orang Indonesia pribumi. Kemudian, pada dekade yang sama, anak-anak Suharto muncul sebagai kelompok oligark terakhir yang signifikan. Bahkan, salah satu faktor terpenting yang melemahkan Orde Baru Suharto adalah kemampuan anak-anaknya yang telah dewasa untuk mengganggu sistem pertahanan kekayaan dan penjinakan oligarkis yang didasarkan pada politik kedekatan dengan Suharto. Anak-anak Suharto, yang aksesnya kepada ayah mereka mengalahkan semua saluran keamanan lainnya bagi para oligark. Suharto menolak untuk membatasi atau menghukum anak-anaknya, dan akibatnya bagi oligark lainnya tidak mungkin lagi meminta kepadanya untuk melindungi kepemilikan, menegakkan kesepakatan bisnis, membatasi tindakan predatoris, dan mengelola risiko—yang sebagian besar justru semakin banyak berasal dari anak-anaknya sendiri. Orde Baru berubah dari sebuah oligarki yang sangat dapat diprediksi dan cukup terkendali, yang cenderung mendorong investasi, menjadi sistem yang membuat frustrasi dan semakin berisiko bagi para oligark untuk bergerak di dalamnya. Setelah menjadi jelas bahwa tokoh-tokoh kuat seperti Jenderal Benny Murdani dan bahkan Jenderal Prabowo Subianto membayar harga yang mahal di hadapan Suharto karena berbicara mengenai gesekan yang ditimbulkan oleh anak-anaknya, para oligark Indonesia mengetahui bahwa sistem keamanan dan respons yang dapat diandalkan berdasarkan kedekatan dengan Cendana, kediaman pribadi Suharto, telah runtuh. Cendana semakin menjadi sumber ancaman terhadap kekayaan, bukan lagi pusat pertahanan kekayaan. Pukulan terakhir datang ketika Suharto mulai mempersiapkan beberapa anaknya untuk suksesi politik. Perkembangan yang mengkhawatirkan ini terjadi pada tahun-tahun menjelang dimulainya krisis keuangan pada 1997. Bukan berarti elite dan oligark Indonesia—serta pihak-pihak asing yang sama-sama frustrasi di tempat-tempat seperti Washington, DC, dan New York—bekerja dan berkomplot untuk menjatuhkan Suharto. Sebaliknya, mereka secara diam-diam tetapi aktif meninggalkan Suharto ketika ia menghadapi apa yang kelak menjadi guncangan ekonomi terakhir dalam pemerintahannya.

Sudah jelas bagi semua orang, tidak terkecuali para mahasiswa yang mulai berkumpul di jalan-jalan, bahwa Suharto telah berada dalam posisi rentan dan rentan secara politik. Ketika akhirnya keadaan mulai tenang dan demokrasi terbentuk, semua oligark dan elite masih tetap ada. Hampir tidak ada yang jatuh bersama Suharto, kecuali satu atau dua orang yang tetap berdiri di sisinya sampai akhir. Meskipun kesinambungan oligarkis dan elite hampir 100 persen, dua hal telah berubah. Yang pertama adalah bahwa para aktor di puncak harus beradaptasi dengan permainan demokrasi yang baru. Mereka tidak hanya melakukan hal tersebut dengan relatif mudah, tetapi mereka juga berada dalam posisi yang lebih baik daripada siapa pun untuk merebut dan mendominasi politik elektoral Indonesia yang digerakkan oleh uang. Berbeda dengan banyak oligark di Filipina dan beberapa negara demokrasi Amerika Latin yang dipersenjatai dan dapat mengerahkan milisi mereka untuk saling berhadapan, karena alasan-alasan historis oligark Indonesia sejak awal tidak dipersenjatai. Hal ini memfasilitasi permainan pembagian keuntungan demokrasi di antara mereka dan membantu menjaga persaingan tetap relatif tertib. Para oligark memiliki uang, kerajaan media, jaringan, dan posisi dalam partai-partai politik—atau sumber daya untuk menciptakan partai baru—yang memungkinkan mereka mendominasi sistem demokrasi baru dan menjalankan strategi pertahanan kekayaan di luar panggung politik. Untuk bersaing memperebutkan jabatan—atau, bagi orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, untuk mendanai orang Indonesia pribumi yang maju dalam pemilihan—oligark harus mengerahkan uang dalam jumlah sangat besar, terkadang hingga ke tingkat desa. Hal kedua, yang berubah ketika Orde Baru berakhir adalah bahwa Indonesia hampir dalam semalam berubah dari kondisi di mana Suharto membatasi oligark menjadi kondisi di mana negara harus bergantung pada infrastruktur hukum yang telah dilemahkan untuk melakukan tugas tersebut. Sayangnya bagi bangsa ini, tidak ada lagi institusi hukum dan penegakan hukum yang kuat, independen, dan impersonal yang harus dipatuhi oleh para aktor Indonesia yang paling berkuasa. Dalam persoalan kepemilikan, kekayaan, ekonomi, korupsi, dan berbagai bentuk kriminalitas, hukum justru tunduk kepada oligark dan elite individual, bukan sebaliknya. Hal ini terjadi karena para aktor tersebut memiliki sumber daya kekuasaan material yang dapat mereka gunakan untuk membeli dan membelokkan sistem hukum, mulai dari polisi dan jaksa hingga hakim dan politisi.

Berbagai patologi yang ditimbulkan oleh kondisi ini telah menghambat momentum Reformasi dan melahirkan kerinduan yang berbahaya terhadap kepastian yang diberikan oleh seorang pemimpin bertangan besi. Telah muncul ketidakpuasan yang terus-menerus, tetapi keliru, terhadap demokrasi Indonesia. Korupsi yang merajalela, pejabat terpilih yang berkinerja buruk, kepemimpinan yang tidak tegas, meningkatnya politik Islam fundamentalis dan terkadang kekerasan, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat telah disalahkan kepada transisi demokrasi Indonesia setelah 1998. Tidak jarang terdengar orang dari berbagai lapisan masyarakat mengungkapkan nostalgia terhadap ketertiban rezim Suharto.

"Masalah" utama Indonesia adalah bahwa negara ini dibebani oleh sekelompok oligark dan elite yang sangat berkuasa yang perilaku patologisnya hampir tidak terkendali**.** Dan, sayangnya, demokrasi elektoral dirancang dengan buruk untuk menjinakkan mereka. Bahkan, oligark dan elite Indonesia sebenarnya telah menangkap dan kini sepenuhnya mendominasi institusi-institusi demokratis negara, tetapi tampaknya tidak mampu menggunakan institusi tersebut secara kolektif untuk mencapai suatu oligarki yang beradab (**"***civil oligarchy***"**) dengan infrastruktur hukum yang kuat, yang akan melindungi hak-hak kepemilikan sebagai imbalan atas kesediaan para oligark untuk tunduk pada supremasi hukum (*"rule of law"*)**.**

Media, Oligark, dan Partai

Para oligark yang memiliki ambisi politik juga mengejar posisi strategis dalam pasar media massa Indonesia. Berbagai media baru muncul setelah 1998, uang dalam jumlah besar bergerak secara agresif untuk mengonsolidasikan sebagian besar sumber informasi dan komunikasi. Prosesnya semakin cepat ketika para pemain politik besar menyadari bahwa media dapat menentukan keberhasilan atau kehancuran seorang kandidat. Kini, sejumlah kecil oligark memiliki sebagian besar media cetak, televisi, radio, dan media daring di Indonesia. Pada tahun 1997, menjelang keruntuhan Soeharto, terdapat 289 media cetak. Jumlah ini melonjak selama masa transisi demokrasi menjadi 1.381 pada tahun 1999 dan 1.881 pada tahun 2001. Namun, pada tahun 2006 jumlah tersebut kembali turun menjadi 889. Kelompok-kelompok media besar memiliki lima dari enam surat kabar Indonesia dengan sirkulasi tertinggi dan seluruh empat situs media berita daring terbesar. Mereka juga memiliki sebagian besar jaringan radio unggulan yang berasal dari Jakarta dan kota-kota terbesar, serta sebagian besar stasiun radio lokal. Pasar TV yang sangat penting didominasi oleh stasiun-stasiun TV nasional yang menguasai lebih dari 90 persen jam tayang yang ditonton pemirsa di seluruh kepulauan Indonesia. Kepemilikan stasiun TV terkonsentrasi pada lima perusahaan yang menguasai 96,6 persen dari seluruh stasiun nasional. Media Indonesia bebas dalam arti bahwa intimidasi keras dari negara kini jarang terjadi. Namun, media juga sepenuhnya bercorak korporasi dan didominasi oleh oligark-oligark yang memiliki kekuatan luar biasa.

Spektrum ideologis media berkisar dari konservatif hingga sayap kanan ekstrem. Sebagian besar konflik dan perdebatan di antara media muncul karena pertentangan antara tokoh-tokoh oligarkis atau kelompok-kelompok politik yang memiliki media tersebut. Satu-satunya variasi utama lainnya di antara berbagai publikasi atau siaran adalah apakah mereka bersifat kaku dan menyasar kalangan kelas atas (seperti Kompas dan MetroTV), atau menghasilkan sajian sensasional, bersifat lawakan/berlebihan, atau bahkan bermuatan takhayul untuk pasar yang lebih luas (contohnya terlalu banyak untuk disebutkan).

Para kandidat serius dalam pemilihan presiden tahun 2014 (dan pemilihan kepala daerah utama) harus membeli akses media, yang dalam beberapa kasus berarti membeli stasiun televisi dan radio serta surat kabar secara langsung. Prabowo dan saudaranya, Hashim, berada di pasar untuk membeli stasiun TV. Oligark besar lainnya telah berinvestasi besar-besaran di televisi dan berencana meluncurkan lembaga jajak pendapat nasionalnya sendiri pada tahun 2013 dengan tujuan yang secara eksplisit dinyatakan untuk memengaruhi kontestasi presiden tahun 2014. Kandidat-kandidat oligarkis juga membeli partai politik—atau membeli jalan mereka untuk naik ke jajaran kepemimpinan partai. Hal ini terjadi dalam beberapa cara. Di tingkat regional dan lokal, para kandidat membayar sejumlah besar uang kepada para pemimpin partai untuk memperoleh dukungan partai secara nasional, dan aliran uang juga bergerak ke bawah. Mereka yang ingin menjadi pemimpin partai bersaing memberikan pembayaran dalam jumlah sangat besar kepada para delegasi dalam kongres partai nasional untuk mengungguli lawan-lawan mereka dalam memperebutkan posisi seperti ketua partai atau sekretaris jenderal. Dalam beberapa kasus, para oligark menggunakan kekuatan uang mereka (atau uang para pendukung mereka jika mereka belum menjadi pemain besar) untuk menciptakan partai-partai baru dari nol. Inilah yang dilakukan Hashim dan Prabowo dengan Gerindra, dan Surya Paloh dengan NasDem. Gagasannya adalah menjadikan diri sendiri sebagai ketua partai sehingga dapat didorong atau diantarkan menuju kursi kepresidenan. Tahap terakhir dalam "membeli" sebuah partai berlangsung selama proses yang hiruk-pikuk untuk mengumpulkan cukup banyak perwakilan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, parlemen Indonesia) guna memenuhi ambang batas untuk menjadi kandidat presiden.

Pada tahun 2009, kandidat presiden membutuhkan dukungan dari partai-partai yang memiliki sedikitnya 20 persen kursi di DPR, atau yang telah memperoleh 25 persen suara. Selalu terdapat banyak tawar-menawar politik mengenai calon wakil presiden dan janji-janji mengenai posisi dalam kabinet. Namun, kesepakatan-kesepakatan semacam itu tidak pernah cukup untuk membentuk aliansi atau koalisi yang berhasil di Indonesia. Seorang calon presiden juga harus siap membayar jutaan dolar dalam bentuk uang tunai kepada sekutu-sekutu partainya. Sebagian dari pembayaran tersebut mengalir ke kas partai-partai lain, dan sebagian lainnya masuk langsung ke kantong para pemimpin partai. Jika seseorang ingin menang dalam permainan yang digerakkan oleh uang —dan bukan seorang oligark yang telah memiliki kekayaan pribadi dalam jumlah besar—maka ia harus mendapatkan dukungan finansial dari oligark-oligark besar Indonesia yang mampu menyediakan uang untuk kepentingan politik. Parameter risikonya cukup dipahami dan diantisipasi oleh sebagian besar oligark sehingga mereka menyediakan dana secara strategis dan "sukarela." Namun, terkadang diperlukan bujukan, yang sering kali melibatkan unsur pemerasan yang kuat. Para kandidat dan pendukung mereka mengancam—secara tersirat maupun terang-terangan—untuk mengganggu atau menghukum oligark yang menolak memberikan dukungan finansial.

Kasus-kasus hukum di masa lalu atau yang sedang tidak aktif selalu dapat dihidupkan kembali, dan izin-izin usaha penting dapat tiba-tiba dicabut atau secara misterius diwajibkan untuk ditinjau kembali. Salah satu perhitungan politik terpenting yang dapat dilakukan seorang oligark—dan hal ini terutama berlaku bagi oligark etnis Tionghoa yang rentan, yang memiliki peluang sangat terbatas untuk meningkatkan kekuatan material mereka melalui tuas pertahanan-kekayaan yang tersedia melalui jabatan—adalah menentukan kandidat mana yang harus didukung dan berapa banyak uang tunai yang harus disediakan. Selalu ada unsur-unsur ilegal di balik kekayaan-kekayaan besar di Indonesia. Hal ini membuat para oligark secara permanen rentan untuk ditekan. Bahkan jika para oligark ini ingin bermain secara ketat berdasarkan aturan hukum yang telah dilembagakan (dan banyak dari mereka mungkin memang menginginkannya), hal tersebut mengandaikan bahwa sejak awal terdapat kode hukum dan prosedur yang jelas untuk diikuti. Kenyataannya tidak demikian di Indonesia. Hal ini sebagian disebabkan oleh hukum-hukum yang sudah usang dan saling bertentangan yang berasal dari masa kolonial Belanda, dan sebagian lagi merupakan cerminan dari meningkatnya otonomi daerah setelah 1998, yang menghasilkan hukum-hukum yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi (tidak ada bidang yang lebih banyak mengalami masalah ini daripada peraturan dan pemetaan yang mencakup status, batas, kepemilikan, dan penggunaan tanah). Namun, alasan yang sama pentingnya mengapa terdapat begitu banyak kekacauan hukum adalah bahwa ketidakpastian hukum memainkan peran yang sangat penting dalam permainan pemerasan dan pembagian paksa yang terus-menerus, yang mendistribusikan kembali kekayaan di antara para oligark dan elite Indonesia. Permainan terbesar di negeri ini bukanlah penciptaan kekayaan yang dinamis melalui industri dan jasa, melainkan redistribusi kekayaan secara agresif di antara mereka yang berkuasa setelah kekayaan tersebut diekstraksi dari sumber daya alam negara yang semakin menurun. Para oligark dan politisi harus menguasai permainan uang, pemilu, jabatan, hukum, dan pemerasan ini jika mereka ingin menang (atau sekadar bertahan hidup) dalam ekonomi-politik Indonesia yang penuh tantangan. Ini bukan aspek sementara dari politik Indonesia yang kemungkinan akan menghilang seiring dengan membaiknya *"kualitas demokrasi"* dalam siklus-siklus pemilu yang akan datang. Sebaliknya, hal ini merupakan karakteristik yang menentukan bagaimana oligarki dan demokrasi berpadu di Indonesia kontemporer. Dan betapapun banyaknya pihak-pihak yang bermain di tingkat atas mengeluhkan berbagai distorsi yang ditimbulkan oleh semua ini terhadap politik bangsa, atau betapa jijiknya mereka secara pribadi karena harus ikut ambil bagian di dalamnya, hubungan antara kekuatan uang dan politik ini sudah mengakar kuat dan mampu meregenerasi dirinya sendiri.

Oligark dan Partai Politik di Indonesia

Sejauh mana oligark "memerintah" atau mendominasi partai-partai politik Indonesia sangat bergantung pada bagaimana istilah "oligark" didefinisikan.

Menurut Prof. Jeffrey Winters, oligark "adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusif mereka." Winters menjelaskan bahwa sumber daya tersebut tidak harus dimiliki secara pribadi. Berdasarkan definisi ini, politisi populer yang mampu menarik sumbangan besar dari para penyandang dana juga dapat diklasifikasikan sebagai oligark, meskipun mereka sendiri mungkin tidak memiliki kekayaan yang sangat besar. Definisi lain: Oligark adalah aktor yang sumber kekuasaan utamanya adalah kepemilikan pribadi dan langsung atas sejumlah besar modal**.** Modal tersebut, pada gilirannya, digunakan untuk memperoleh keuntungan politik dan/atau ekonomi. Definisi ini mencakup keistimewaan material para oligark dalam persaingan politik secara lebih ringkas dan efektif, sehingga memungkinkan kita memusatkan perhatian pada kekayaan pribadi—sebagai lawan dari sumber daya keuangan yang dapat dihimpun oleh politisi konvensional ketika mencalonkan diri atau menduduki jabatan publik—sebagai instrumen politik utama para oligark. Definisi tersebut juga memungkinkan pemisahan penguasaan pribadi atas sumber daya material dari sumber daya politik lainnya, seperti modal sosial, popularitas, garis keturunan dinastik, dan keterhubungan di dalam institusi.

Contoh klasik seorang pemimpin partai oligarkis adalah Aburizal Bakrie, ketua Golkar saat itu. Pada awal 1970-an, Aburizal bergabung dengan perusahaan yang didirikan oleh ayahnya, dan ia berhasil mengembangkannya menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Meskipun krisis tahun 1998 menghantam kepentingan Bakrie dengan keras, perusahaannya tetap bertahan—sebagian besar berkat kesepakatan restrukturisasi utang yang sangat menguntungkan. Selanjutnya, Bakrie menggunakan koneksi ekonomi dan politiknya untuk memperoleh akses terhadap izin-izin pertambangan batu bara yang menguntungkan di luar Pulau Jawa. Ketika harga batu bara meningkat secara drastis—naik lima kali lipat antara tahun 2002 dan 2008[19]—demikian pula nilai saham-saham Bakrie meningkat. Dengan bisnisnya yang berkembang pesat, Bakrie memutuskan untuk memasuki dunia politik. Pada tahun 2004, ia gagal memperoleh pencalonan presiden dari Golkar, kemudian mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, dan sebagai imbalannya memperoleh jabatan menteri. Selama berada di pemerintahan, bisnis Bakrie terus berkembang—pada tahun 2007, majalah *Forbes* menempatkannya sebagai orang terkaya di Indonesia, dengan kekayaan sebesar US$5,4 miliar. Meskipun kekayaannya menurun secara drastis setelah tahun 2008 akibat merosotnya harga batu bara, ia tetap mampu menggunakan pengaruh politiknya untuk melindungi kepentingan bisnis pribadinya. Sebagai contoh, meskipun salah satu perusahaan pengeboran Bakrie menyebabkan terjadinya semburan lumpur yang kini terkenal di Sidoarjo, Jawa Timur, yang membanjiri lebih dari 700 hektare wilayah padat penduduk pada Mei 2006, pemerintah tidak meminta Bakrie untuk menanggung sepenuhnya kerugian yang ditimbulkan.

Meskipun Yudhoyono mewajibkan Bakrie mengeluarkan sekitar US$700 juta untuk membeli tanah yang telah hancur, pemerintah menanggung seluruh biaya jangka panjang untuk pemulihan tanah dan bantuan sosial. Contoh-contoh paradigmatik mengenai pemimpin partai yang non-oligarkis dan oligarkis, memungkinkan untuk mengukur tingkat intervensi oligarkis dalam partai-partai Indonesia. Salah satu cara yang efektif untuk melakukannya adalah dengan menetapkan jumlah oligark yang saat ini memimpin partai-partai politik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, dan menerapkan definisi di atas, ditemukan bahwa dominasi oligark sama sekali tidak bersifat mutlak: dari sepuluh partai utama yang mengikuti pemilihan umum tahun 2014, lima di antaranya dipimpin oleh oligark. Partai-partai yang didominasi oleh oligark adalah Golkar (Bakrie), saat ini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, Partai NasDem (Partai Nasional Demokrat), milik Surya Paloh, Partai yang dipimpin oleh Hatta Radjasa, PAN (Partai Amanat Nasional), saat ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan, Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) milik Prabowo Subianto, dan Partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat, ketika dipimpin oleh Wiranto), saat ini dipimpin oleh Dr. Oesman Sapta. Ini merupakan kasus-kasus di mana kekayaan pribadi para oligark telah memungkinkan mereka untuk membeli jabatan ketua dari sebuah organisasi yang telah ada atau mendirikan sebuah partai baru dari nol. Tanpa sumber daya pribadi yang sangat besar tersebut, mustahil bagi mereka untuk memainkan peran yang signifikan dalam politik. Terdapat sumber daya politik utama para pemimpin partai yang bukan karena uang, melainkan berbagai bentuk modal sosial. Sebagai contoh, sumber kekuasaan utama Megawati adalah warisan dinastiknya dan karismanya. Sebagai putri Presiden pendiri Indonesia, Sukarno, ia mampu memobilisasi ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru pada masa-masa akhir kekuasaannya. Setelah memperoleh dukungan masyarakat yang lebih besar berkat pencapaian tersebut, ia kemudian memenangkan pemilihan umum pertama pasca-otoritarian pada tahun 1999 dan menjadi presiden pada tahun 2001. Jelas bahwa popularitasnya yang sangat besar dan keberhasilan elektoralnya menarik sumbangan dan berbagai bentuk dukungan lainnya dari para oligark, tetapi hal ini tidak berarti bahwa ia sendiri adalah atau pernah menjadi seorang oligark.

Winters menggambarkan Megawati sebagai seorang oligark "tersembunyi" ("*hidden oligarch"*), tanpa menjelaskan secara tepat apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Megawati bukanlah seorang aktor oligarkis dalam kapasitasnya sendiri. Demikian pula, Muhaimin Iskandar memperoleh kedudukannya di dalam PKB berkat garis keturunan dan hubungan pribadinya di dalam Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim tradisionalis terbesar di Indonesia. Sebagai keponakan Abdurrahman Wahid—pemimpin NU pada tahun 1980-an dan 1990-an serta Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001—Muhaimin memiliki keuntungan yang signifikan ketika ia memulai karier organisasinya di NU pada tahun 1990-an. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia antara tahun 2004 dan 2014, juga merupakan aktor non-oligarkis.

Tidak seperti Prabowo dan Wiranto, Yudhoyono tidak mengandalkan sumber daya modal yang sangat besar untuk meluncurkan karier politiknya. Popularitas Yudhoyono tumbuh dengan cepat pada awal tahun 2000-an karena penampilannya di media yang dirancang dengan baik serta citra gaya politiknya yang tenang dan penuh pertimbangan, yang menenangkan para pemilih Indonesia yang diliputi kecemasan. Daya tarik elektoralnya yang belum pernah terjadi sebelumnya menarik minat para oligark, tetapi Yudhoyono tidak berutang kebangkitannya kepada mereka. Winters menggambarkan Yudhoyono sebagai perpaduan antara seorang oligark penuh dan oligark tersembunyi—yang memperlihatkan baik kesulitan-kesulitan yang melekat dalam definisinya mengenai oligarki maupun penerapannya yang tepat terhadap kasus Indonesia. Secara keseluruhan, penilaian yang lebih rinci mengenai peran yang dimainkan oleh para oligark dalam partai-partai Indonesia memberikan gambaran sbb: *Pertama,* "hanya" setengah dari kepemimpinan partai-partai Indonesia berada di tangan para oligark, sementara separuh lainnya dikendalikan oleh politisi yang lebih konvensional dengan sumber daya politik alternatif. Dengan demikian, para aktor politik utama tidaklah hampir selalu merupakan oligark. Ini menunjukkan bahwa kontestasi yang terus berlangsung, bukan dominasi oligarkis, merupakan ciri utama hubungan kekuasaan di dalam partai-partai Indonesia. *Kedua,* kecenderungan oligarkisasi dalam kepemimpinan beberapa partai didorong oleh kegagalan para perancang institusi di Indonesia untuk merespons secara memadai meningkatnya biaya operasi politik setelah tahun 2004—tahun ketika pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung mulai diperkenalkan. Alih-alih memperkuat hambatan-hambatan kelembagaan yang sudah ada terhadap pengaruh oligarkis dan membangun hambatan-hambatan baru, Indonesia justru hampir sepenuhnya menghapus salah satu hambatan yang paling penting, yaitu pendanaan publik bagi pengurus pusat partai-partai politik. Oleh karena itu, meningkatnya kekuasaan para oligark Indonesia setelah tahun 1998 bukan semata-mata merupakan akibat dari terbebasnya mereka dari belenggu yang diberlakukan Soeharto terhadap mereka, "*melainkan lebih merupakan konsekuensi dari kelemahan institusional yang besar, yang bukan merupakan tanggung jawab para oligark".*

Oligarki Mendanai Jokowi

Terpilihnya Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2012 memberikan ilustrasi yang berguna mengenai peran intervensi oligarkis dalam pilihan-pilihan demokratis yang tersedia bagi rakyat Indonesia. Jokowi menantang dan mengalahkan gubernur Jakarta yang sedang menjabat, Fauzi Bowo, seorang aparatchik oligarkis klasik. Sebagian dari strategi Jokowi adalah berpura-pura bahwa ia tidak memiliki strategi. Sebaliknya, ia mengadopsi sikap publik yang santai dan sederhana dengan gaya, banyak melontarkan lelucon, dan menghabiskan sebagian besar waktunya mengunjungi orang-orang biasa dan kaum miskin di seluruh ibu kota.

Pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa, sebagai orang luar yang berasal dari kota Surakarta, ia tidak tercemar oleh permainan "politik uang" yang terkenal dan merasuki sebagian besar kontestasi politik di Indonesia. Sebagai kandidat, ia menyampaikan sangat sedikit rencana konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kronis Jakarta dan tidak pernah menjelaskan bagaimana ia akan menghadapi kepentingan-kepentingan kuat dan sangat mengakar di ibu kota. Beberapa hari kemudian, majalah Tempo menerbitkan sebuah artikel yang mengungkap banyak hal dan berfokus pada para oligark yang mendukung pencalonan Jokowi. Para pendukung utama yang memungkinkan pencalonan tersebut adalah Hashim Djojohadikusumo dan saudaranya, Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, yang akan maju dalam pemilihan presiden tahun 2014 sebagai kandidat dari Partai Gerindra, yang juga sangat banyak disubsidi oleh Hashim.

Pada saat-saat terakhir, peran pendukung juga dimainkan oleh mantan presiden sekaligus ketua PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) Megawati Sukarnoputri (bertentangan dengan keinginan suaminya, Taufik Kiemas). Meskipun Jokowi baru saja terpilih sebagai wali kota Solo/Jawa Tengah (dari PDI-P), justru Gerindra yang menggerakkan pencalonannya. Prabowo bertemu dengannya pada Februari 2012 setelah adanya undangan yang diatur oleh Hashim, yang telah mengenal Jokowi selama beberapa tahun. Dalam hitungan minggu, kandidat tersebut mengadakan pertemuan dengan Hashim sendiri. Dalam pertemuan inilah Jokowi diminta oleh Hashim untuk memasuki kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Komitmen pendanaan juga dibuat. Sementara itu, Prabowo bertemu dengan Megawati yang semula enggan untuk mendesaknya agar mendukung kandidat dari partainya sendiri. Jika ia tidak setuju, Prabowo siap merangkai sebuah koalisi partai-partai kecil untuk mendukung rencana tersebut. Hashim dan Prabowo-lah yang memilih pasangan calon Jokowi (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok) dan mengumumkan kepada pers mengenai niat duet tersebut untuk maju dalam pemilihan. Prabowo mengatakan kepada para wartawan bahwa ia bahkan bersedia menjadi ketua tim kampanye.

Pada awal Maret 2012, PDI-P telah mengundang Jokowi ke Jakarta untuk menjalani uji "*fit and proper*" selama lima menit dan untuk menjajaki kesiapannya mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di Jakarta. Ia memberi tahu Megawati bahwa ia bersedia, tetapi hambatan yang jelas adalah uang. Dengan kekayaan pribadi yang hanya sekitar US$3 hingga US$5 juta, ia tidak memiliki dana untuk menjalankan kampanye berskala Jakarta yang efektif melawan petahana yang kaya raya. Hanya para oligark yang memiliki sumber daya kekuasaan untuk mengubah potensi Jokowi sebagai kandidat menjadi kenyataan. Dalam peristiwa tersebut, Prabowo telah memberi isyarat kepada Jokowi melalui Ahok bahwa sumber daya yang diperlukan akan disediakan. Kemenangan Jokowi yang sangat populer atas gubernur petahana merupakan hasil dari gelombang dukungan yang datang dari puluhan kelompok, mulai dari mahasiswa hingga berbagai asosiasi ibu rumah tangga, yang membantu mendorongnya menuju kemenangan.

Namun, bagian penting dari kisah demokratis ini menjadi mungkin karena adanya langkah oligarkis sebelumnya, di mana kekuatan kekayaan menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih sejak awal. Sekalipun ia kemudian memperoleh dukungan akar rumput, ia tidak akan sampai pada kontestasi gubernur sebagai akibat dari inisiatif atau politik akar rumput.

Oligarki Setelah Reformasi

Hanya sedikit indikator yang jelas mengenai berakhirnya Reformasi selain proyek *"penulisan ulang"* sejarah Indonesia yang diumumkan dalam sebuah proyek buku teks baru di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, berupaya merehabilitasi Orde Baru. Alasan-alasan yang mendasari berakhirnya Reformasi tidak dapat dipisahkan dari penataan kembali kekuasaan oligarkis setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998. Oligarki terus berkembang dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru dalam format demokrasi yang semakin illiberal[#)], bahkan ketika ia memasukkan pemain-pemain dan strategi-strategi baru untuk mempertahankan dominasi sosial-ekonomi dan politiknya. Melalui keberhasilannya mengambil alih Reformasi, suatu bentuk demokrasi illiberal menjadi mengakar di Indonesia, yang sebagian besar menggantikan dorongan-dorongan liberal secara politik yang muncul pada tahun-tahun awal setelah Soeharto. Para pendukung liberal dan progresif perubahan sosial tersingkir dalam proses tersebut, yang mencerminkan lemahnya posisi sosial mereka pada masa Orde Baru setelah puluhan tahun mengalami penindasan dan disorganisasi. Tidak lama kemudian, reformasi total, slogan yang diteriakkan para aktivis mahasiswa anti-Soeharto, menghilang ke latar belakang, digantikan oleh perubahan yang lebih terukur, di dalamnya kepentingan-kepentingan oligarkis dapat beroperasi. Hasil keseluruhannya adalah bahwa politik pada era Reformasi semakin terbatas pada persaingan di antara para oligark sendiri. Oleh karena itu, Reformasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah melalui berbagai tahapan yang berbeda, meskipun saling tumpang tindih. *Tahap pertama* mencakup tahun-tahun awal ketika kepentingan oligarkis dipertahankan di dalam institusi-institusi elektoral dan demokratis Reformasi itu sendiri. *Tahap kedua* dimulai sekitar setelah jatuhnya Gus Dur pada 2001, berlanjut sepanjang akhir masa kepresidenan Megawati, dan terus berlangsung pada masa kepresidenan SBY, bahkan hingga tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi. Tahap ini terutama berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan kepentingan oligarki dalam format demokrasi yang semakin illiberal, yang bertujuan membendung berbagai tantangan dari luar. Namun, tahap ini juga menyaksikan berkembangnya strategi-strategi politik baru ketika pertarungan internal oligarki yang tidak terorganisasi dan terdesentralisasi mengenai perebutan keuntungan dari kekuasaan semakin intensif. *Tahap ketiga*, ditandai bukan hanya oleh semakin mengakarnya demokrasi illiberal, tetapi juga oleh sentralisasi bertahap dalam operasi oligarki. Hal ini mencakup pembatasan terhadap penguasaan dan akses atas instrumen-instrumen kekuasaan negara yang menentukan distribusi dan alokasi sumber daya.

Hasilnya adalah semakin menyempitnya ruang persaingan di dalam oligarki itu sendiri, sekaligus berkembangnya lingkungan politik yang semakin tidak bersahabat terhadap tantangan-tantangan reformis yang liberal dan progresif. Dimaksudkan untuk memberikan keteraturan terhadap persaingan internal oligarki, peningkatan sentralisasi kekuasaan tersebut dimulai oleh Jokowi, tetapi kemudian tampil secara lebih terang-terangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Hal ini semakin berkaitan dengan upaya membangun supremasi Prabowo sendiri atas para pesaing oligarkisnya, termasuk Jokowi, melalui suatu formula baru politik otokratis dan populis serta kapitalisme yang dikelola negara.

Kontradiksi-Kontradiksi Utama

Kontradiksi-kontradiksi tersebut terlihat dengan jelas dalam ranah masyarakat sipil yang sebelumnya telah mengalami berbagai pembatasan dalam pelaksanaan sejumlah hak, yang sebagian besar diperoleh selama tahap-tahap awal *Reformasi*. Tidak mengherankan apabila konsekuensinya terutama dirasakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lebih rentan. Kita telah melihat bentrokan antara komunitas-komunitas lokal dan aparat keamanan dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang melibatkan perampasan tanah. Hal ini pada gilirannya memberikan dalih bagi remiliterisasi urusan sipil, sehingga menciptakan medan yang semakin sulit bagi para pembaru masyarakat sipil untuk menantang berbagai usaha politik dan ekonomi oligarkis. Kita juga telah melihat semakin banyak bentrokan antara personel angkatan bersenjata dan kepolisian nasional—yang sebelumnya memperoleh manfaat dari relatif menurunnya pengaruh militer sejak 1998. Beberapa di antaranya melibatkan perebutan wilayah kekuasaan atas kegiatan ekonomi ilegal. Yang penting bagi masyarakat sipil adalah perubahan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut yang ditunjukkan oleh bentrokan-bentrokan semacam itu. Hal tersebut memberikan perbedaan bagi para pengorganisasi buruh, misalnya, apakah mereka berhadapan dengan para preman bayaran, kantor kepolisian setempat, atau seluruh kekuatan komando militer daerah dalam perselisihan perburuhan. Sebagai mantan jenderal angkatan darat, Prabowo semakin mengandalkan militer, baik untuk memperkuat posisinya sendiri di dalam oligarki maupun untuk melindungi kepentingan oligarkis secara keseluruhan dari tantangan-tantangan eksternal. Namun, salah satu komplikasinya adalah bahwa banyak posisi militer tingkat tinggi masih ditempati oleh orang-orang yang ditunjuk Jokowi ketika Prabowo mengambil alih kepresidenan—sebagian dari apa yang disebut sebagai 'Genk Solo' milik mantan presiden tersebut. Konsentrasi kewenangan atas instrumen-instrumen kekuasaan ekonomi dan politik, tidak mengherankan, sangat memengaruhi mereka yang paling banyak memperoleh manfaat dari desentralisasi administratif—kepentingan-kepentingan predatoris di tingkat lokal. Di banyak daerah dan wilayah, terdapat beberapa lapisan broker kekuasaan partai politik, perantara, dan pelaku bisnis yang kapasitasnya untuk melakukan akumulasi privat yang relatif otonom melalui praktik-praktik rentier lokal semakin berkurang.

Mereka secara wajar waspada terhadap kecenderungan Prabowo untuk menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung, yang berpotensi semakin mengukuhkan subordinasi mereka terhadap kepentingan-kepentingan yang ditetapkan di Jakarta Kontradiksi juga tampak dalam pembuatan kebijakan ekonomi, ketika populisme statis yang diambil alih Prabowo dari Jokowi semakin berbenturan dengan disiplin fiskal teknokrasi neo-liberal. Kita dapat melihat hal ini dalam kebijakan populis dan kebijakan industri yang terkait dengan kebangkitan kembali kapitalisme negara, yang sedang menghasilkan krisis fiskal yang terus berkembang. Memang, kebijakan-kebijakan semacam itu hanya dapat dipertahankan melalui eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali di tengah meningkatnya utang. Namun, kontradiksi tersebut juga berkisar pada tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari suatu kebijakan industri nasional, yang menyediakan peluang-peluang rentier baru bagi oligarki, dan aspek-aspek redistributif dari retorika populis pemerintah. Ini merupakan kontradiksi ketika penciptaan peluang untuk melakukan perampasan predatoris dengan kedok seruan nasionalis dan populis berhadapan dengan tuntutan akan keadilan sosial dan pemerintahan yang jujur.

Menuju Masa Depan

Sistem-sistem dominasi oligarkis tentu saja dapat retak dari dalam, menciptakan peluang bagi aliansi dengan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya tidak terorganisasi di luar lingkup mereka. Retakan internal semacam ini jauh lebih mungkin mengancam koherensi oligarki dibandingkan ketidakpuasan yang semata-mata dihasilkan oleh akumulasi penderitaan di antara mereka yang tersisih darinya. Di Indonesia, agenda sentralisasi kembali berisiko menghasilkan perpecahan internal semacam ini dengan meminggirkan kepentingan-kepentingan yang berada di pinggiran oligarki. Tekanan fiskal yang semakin dalam dan utang nasional yang terus meningkat hanya akan memperburuk ketegangan-ketegangan ini sekarang setelah era Reformasi telah berakhir. Krisis semacam itu secara tak terelakkan membahayakan kumpulan rente yang menjadi tumpuan berbagai kepentingan yang tergabung dalam oligarki.

Beberapa skenario masa depan yang potensial secara umum dapat diidentifikasi sbb:

Skenario pertama, yang paling tidak disukai oleh kaum reformis, adalah bahwa Prabowo—dan para penerus mana pun yang mengikutinya—akan merespons tantangan-tantangan yang terus berlangsung dengan kembali, sejauh memungkinkan, pada model otoritarianisme gaya Soeharto yang lama. Presiden saat ini dan presiden-presiden mendatang mungkin memperoleh kepercayaan diri dari kenyataan bahwa Vladimir Putin telah berhasil mempertahankan rezim otoriter di Rusia meskipun menghadapi krisis ekonomi, gejolak sosial, dan berbagai komplikasi berkepanjangan yang timbul dari perang di Ukraina. Dari sudut pandang ini, strategi oligarki Indonesia dapat semakin menyerupai strategi yang terlihat di bawah Recep Tayyip Erdoğan di Turkye atau Viktor Mihaly Orbán

(mantan Perdana Menteri Republik Hungaria), di mana praktik-praktik otoriter yang telah mengakar, yang dikombinasikan dengan seruan nasionalis dan populis yang semakin kuat, telah hidup berdampingan dengan proses-proses elektoral yang semakin terkompromikan. *Skenario kedua*, meskipun tampaknya lebih jauh kemungkinannya, adalah kegagalan agenda sentralisasi kembali, yang mengakibatkan berlanjutnya fragmentasi dan disorganisasi kekuasaan oligarkis. Dalam hal ini, oligarki akan ditandai oleh titik-titik pusat persaingan yang terus berubah, sebagaimana telah terjadi selama sebagian besar seperempat abad terakhir. Skenario ini mengandung arti bahwa unsur-unsur penting dari arsitektur Reformasi berhasil bertahan dari gempuran tanpa henti kebijakan dan praktik sentralisasi kembali yang telah terlihat sejak masa Jokowi. *Skenario ketiga,* yang bahkan lebih kecil kemungkinannya dalam waktu dekat, adalah bahwa disfungsi dan predatorisme oligarkis yang semakin meningkat memicu kebangkitan demokrasi kembali. Inilah hasil yang diharapkan oleh kaum reformis yang berupaya menghidupkan kembali Reformasi di tengah keadaan yang semakin menantang. Namun, hambatannya adalah tetap tidak adanya basis sosial yang kohesif yang mampu membentuk aliansi luas yang bersifat kontra-hegemonik dan anti-oligarkis. Perlu diingat bahwa aliansi semacam itu hanya muncul secara singkat pada 1998, pada puncak salah satu krisis sosial dan ekonomi paling parah yang dihadapi kapitalisme Indonesia dan kawasan yang lebih luas.

Epilog

Kekuasaan yang bersumber dari kekayaan ("*wealth-power*") selalu penting dalam politik, baik dalam sistem demokratis maupun sistem lainnya. Dalam banyak hal, interaksi antara oligark, kekayaan, media, partai, dan demokrasi di Indonesia menunjukkan semakin banyak kesamaan dengan manifestasi kekuasaan oligarkis dalam demokrasi seperti Amerika Serikat (termasuk konsentrasi kepemilikan media yang ekstrem). Perbedaan utamanya adalah bahwa masyarakat sipil dan supremasi hukum jauh lebih kuat di Amerika Serikat. Rezim hukum yang kuat memberikan dua manfaat sekaligus: membatasi oligark individual, sekaligus menyediakan landasan utama bagi pertahanan kepemilikan dan kekayaan. Kedua fungsi tersebut sangat erat kaitannya dalam politik oligarki, dan ketiadaan kedua unsur yang saling terkait ini menjelaskan mengapa Indonesia lebih tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa elektoral ("*electoral ruling oligarchy*"), di mana status sebagai oligark sangat erat kaitannya dengan pemerintahan—daripada sebagai oligarki sipil ("*civil oligarchy*") seperti yang terdapat di Amerika Serikat atau Singapura.

Sejauh media sangat didominasi oleh aktor dan kekuatan politik yang sama, kecil kemungkinan bahwa pers bebas yang kritis atau partai-partai politik akan menyediakan ruang atau sarana untuk menantang bentuk dominasi oligarkis tertentu. Pertumbuhan pesat institusi media Indonesia antara tahun 2011 dan 2020, yang berlangsung bersamaan dengan kerangka hukum saat ini mengenai kebebasan media, seharusnya dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan

bagi terwujudnya keberagaman media dan sudut pandang. Namun, kepemilikan media yang tetap monopolistik dan konten berita politik yang partisan terbukti menjadi hambatan yang signifikan. Pluralitas media dan sudut pandang di Indonesia berada dalam risiko, terutama karena tingginya tingkat konsentrasi kepemilikan media. Hanya delapan perusahaan yang mendominasi sektor media penyiaran dan media cetak, sementara layanan media publik dan media komunitas tetap lemah. Selain itu, kepemilikan lembaga penyiaran televisi sangat monopolistik dan berpusat di Jakarta, sedangkan media radio dan surat kabar berpusat di Pulau Jawa. RRI dan TVRI, meskipun secara hukum diidentifikasi sebagai lembaga penyiaran publik (*"Public Service Broadcasters/PSBs"*), memiliki posisi yang marginal baik dari segi jumlah saluran maupun pangsa audiens. Masalah ini semakin diperburuk oleh meningkatnya konglomerasi dan konvergensi platform (media cetak, penyiaran, dan internet), di mana para pemilik yang sebelumnya hanya memiliki satu platform—seperti media cetak, radio, atau televisi—kini membangun oligopoli multiplatform yang besar dan kuat. Para oligark media yang sekaligus berstatus sebagai politisi telah menjalankan kontrol terhadap ruang redaksi media mereka, dan hal ini telah mendorong terjadinya intervensi dalam praktik-praktik jurnalistik.

Mengenai potensi hukum untuk membatasi oligark dalam jangka pendek maupun menengah, prospeknya juga sama suramnya. Terdapat anggapan dalam literatur akademik bahwa seiring berlangsungnya konsolidasi demokrasi, akan terjadi kemajuan dalam supremasi hukum (*"rule of law")* yang biasanya dipandang sebagai persoalan mengenai *"kualitas demokrasi"*. Namun, tidak ada alasan yang melekat dalam demokrasi yang mengharuskan hal tersebut terjadi.

Demokrasi juga rentan terhadap krisis legitimasi yang melumpuhkan, hanya karena rezim hukum lemah di tingkat elite. Bukti dari berbagai kasus transisi menuju demokrasi di seluruh dunia menunjukkan bahwa "demokrasi tanpa hukum" (*"democracy without law"*) dapat bertahan selama beberapa decade, dan Indonesia telah menjalankan skenario tersebut sejak 1998.

Kecenderungan ke depan, seiring demokrasi Indonesia semakin terkonsolidasi, oligark semakin ditempatkan sebagai penentu utama kehidupan politik negara. Cengkraman oligark terutama terlihat dalam struktur dan operasi partai-partai politik, termasuk pengendalian oligarkis atas siapa yang dapat muncul sebagai kandidat untuk kepemimpinan partai, siapa yang dapat mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan penting, dan bagaimana perangkat politik digunakan untuk tujuan pertahanan kekayaan para Oligark.

Jakarta, 3 September 2026

@) **Oligark** adalah sebutan bagi individua atau anggota dari kelompok kecil orang kaya dan berkuasa, yang menggunakan sumber daya ekonomi serta politik mereka untuk mempengaruhi kebijakan negara demi kepentingan kelompok sendiri. Oligarki merujuk pada sistem atau struktur pemerintahannya, sementara "Oligark" adalah aktor atau pelaku individu di dalam sistem tersebut.

#) **Demokrasi Illiberal** adalah sistem pemerintahan dimana Pemilu tetatp diselenggarakan secara formal, tetapi kebebasan sipil, kontrol terhadap kekuasaan, dan supermasi hukum diabaikan atau dilemahkan.

Referensi:

1. Oligarchs, Politicians, and Activists: Contesting Party Politics in Post-Suharto Indonesia, Marcus Mietzner, Edited by Michele Ford and Thomas B. Pepinsky, Published by: Cornell University Press, Southeast Asia Program Publications (no date and year of publication)
2. Beyond Oligarchy: Oligarchy and Democracy in Indonesia, Jeffrey A. Winters, Cornel University Press, Southeast Asia Program Publications (no date and year of publication)
3. Oligarchy, Jeffrey A. Winters, Cambridge University Press, 2011
4. Oligarchy and Democracy, Jeffrey A. Winters, October 2013
5. Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics, Editor: Michael Ford and Thomas B. Pepinsky, Cornell University Press; Southeast Asia Program Publications, 2014
6. Concentration of Media Ownership in Indonesia: A Setback for Viewpoint Diversity, Masduki, Universitas Islam Indonesia, Indonesia and Leen D'Haenes, University of Leuven, Belgium, International Journal of Communication, 2022
7. Fight Oligarchy, Bernie Sanders, Crown Publication, 2025
8. Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia, Power Reorganized, 2nd Edition, Vedi R. Hadiz and Richard Robison, Edited by Mark R. Thompson, Routledge, City University of Hongkong, 2026
9. Oligarchy, Meaning, Characteristic, Types, Key Details, by Abhishek Singh February 23, 2026
10. Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition, Marcus Mietzner, University of Michigan Press, 2026